

Tinjauan yuridis praktik monopoli dalam jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan L. Say Maumere (studi kasus putusan KPPU No.15/KPPU-L/2018) = Juridical analysis of monopolistic practice in container loading and unloading services at L. Say Maumere Port (case study of commission for the supervision of business competition Republic of Indonesia decision number 15/KPPU-L/2018)

Shafira Harnisa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20501088&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai praktik monopoli jasa bongkar muat petikemas di Pelabuhan L. Say Maumere oleh PT Pelindo III (Persero) dalam Putusan KPPU No.15/KPPU-L/2018. Majelis Komisi KPPU menyatakan praktik monopoli terbukti berdasarkan kebijakan penataan pelabuhan yang dibuat oleh PT Pelindo III (Persero) selaku operator terminal pelabuhan L. Say Maumere yang mewajibkan penumpukan 100% petikemas di Container Yard sehingga mendapat keberatan dari beberapa perusahaan pelayaran selaku pengguna jasa. Penelitian ini membuktikan bahwa PT Pelindo III (Persero) tidak terbukti melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain itu memberikan saran kepada pemerintah terutama Kementerian Perhubungan, KSOP Pelabuhan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan kepelabuhanan

<br>

This thesis analyzes the monopolistic practice by PT Pelindo III (Persero) in loading and unloading container services at L. Say Maumere Port. The KPPU RI commission assembly stated that the monopolistic practice has proved based on the port restructuring policy issued by PT Pelindo III (Persero) as the operator of L. Say Maumere port terminal that required 100% stacking of containers in Container Yard. The policy received objections from several shipping companies as service users. This research concludes that PT Pelindo III (Persero) has not proven of monopolistic action and/or unfair business competition. In addition, this research provides advice related to port management to the government, especially the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, Port KSOP, Supervision of Business Competition of the Republic of Indonesia, and Business Actors.